

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN  
KOMISARIS, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH,  
CROSS-DIRECTORSHIP DAN LIPUTAN MEDIA  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC  
SOCIAL REPORTING (ISR)* BANK UMUM  
SYARIAH PRIODE 2016-2018**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjan Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**Agustomi  
NPM. 1451020006**

**Program Studi : Perbankan Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN  
KOMISARIS, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH,  
CROSS-DIRECTORSHIP DAN LIPUTAN MEDIA  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC  
SOCIAL REPORTING (ISR)* BANK UMUM  
SYARIAH PRIODE 2016-2018**

Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., M.B.A

Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak.

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjan Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Agustomi  
NPM. 1451020006**

**Program Studi : Perbankan Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia telah mengalami peningkatan termasuk perbankan syariah. Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial yang digunakan oleh perbankan syariah masih menggunakan *Global Reporting Index* (GRI) sebagai acuannya padahal saat ini banyak isu penggunaan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship* dan Liputan Media terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship* dan Liputan Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara parsial.? 2. Apakah Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship* dan Liputan Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) secara simultan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan masing-masing dan media lainnya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 12 bank umum dengan unit analisis sebanyak 36 laporan tahunan bank umum Syariah (12 bank x 3 tahun) yang dipilih dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan metode content analysis. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik menggunakan aplikasi Smart PLS 2.0 m3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada BUS di Indonesia. Sedangkan Ukuran Dewan Komisaris, *Cross-directorship* dan Liputan Media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada BUS di Indonesia dan variabel eksogen dinyatakan tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel endogen.

**Kata Kunci :** *Bank Syariah, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-directorship, Liputan Media, ISR.*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukaramé, Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, CROSS-DIRECTORSHIP DAN LIPUTAN MEDIA TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PRIODE 2016-2018.**

**Nama Mahasiswa : Agustomi**

**NPM : 1451020006**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sv., D.B.A  
NIP. 198208082011012009**

**Agus Kurniawan, M.S.Ak  
NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sv., D.B.A  
NIP. 198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, CROSS-DIRECTORSHIP DAN LIPUTAN MEDIA TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PRIODE 2016-2018**, disusun oleh Agustomi, NPM/ 1451020006, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at 20 Desember 2019.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua Sidang**

**: Any Eliza, S.E., M.Ak**

  
(.....)

**Sekretaris**

**: M. Yusuf Bahtiar, M.E**

  
(.....)

**Penguji I**

**: Deki Firmansyah, M.S.I**

  
(.....)

**Penguji II**

**: Agus Kurniawan, M.S.Ak**

  
(.....)

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Kuslan Abdu Ghofur, S.Ag., M. S.I**

**NPM 08012003121001**



## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

(QS. An-Nisa :

58)

**Artinya:** *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*



## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku ku persembahkan kepadaMu ya Rabb, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu sehingga diri ini bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dengan berpegang teguh dengan sunah-sunahnya inshaallah membawa pribadi ini ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai bukti hormat, kasih sayang dan ucapan terima kasih yang mendalam, kupersembahkan dan dedikasikan karya (skripsi) ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta dan tersayang Bapak-Ibu Alm. Mahmude dan Alm. Maisaroh. Terimakasih tak terhingga atas setiap keringat dan air susu yang mengalir dalam darah ini. Tanpa kalian, pribadi ini tak akan pernah mampu menghirup udara kehidupan hingga sejauh ini.
2. Kakak kandungku tersayang Hamzah, Rosita dan Rahman. Yang selama ini telah menjadi pengganti kedua orangtua baik selaku pemberi cinta, pemberi kasih dan sayang serta hal-hal lain yang selama ini telah di berikan.
3. Bpk. Basri dan Ibu. Habibah serta Bpk. Sudirno dan Ibu. Rosmayana. (orang tua angkat) Yang selama ini telah mendidik dan memberi pendidikan, memberi nasihat, saran, serta dan doa-doa yang selama ini telah di berikan.
4. Khairudin, S.Pd.I. Terimakasih atas ilmu, motivasi, semangat serta bantuan-bantuan baik yang bersifat moril maupun materil yang selama ini telah di berikan.

5. Alpine Octavia, S.Pd. Terimakasih atas kesetiaan dan kesediaannya menemani dalam proses pembuatan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis/Peneliti bernama Agustomi, lahir di Kekatang, pada tanggal 14 Agustus 1995 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Merupakan anak ke empat dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri bapak Mahmude dan Ibu Maisaroh.

Adapun Pendidikan yang telah di tempuh yaitu Peneliti memulai Pendidikan Dasarnya di SD Negeri Kekatang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran-Lampung pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2008 peneliti baru melanjutkan kembali Pendidikan Menengah Pertamanya di SMP Negeri 1 Punduh Pidada Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran-Lampung dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Punduh Pidada pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan Tingginya di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) pada program studi Perbankan Syariah (PS). Dan sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis/Peneliti

**AGUSTOMI**

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT, dan dengan mengucapkan syukur, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kepada Allah SWT, Dzat yang maha kuasa, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, karunia-Nya Iman dan Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana program studi Perbankan Syariah (PS). Shalawat teriring salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan terbaik dalam segala urusan, pemimpin revolusioner dan pembawa cahaya kemenangan dunia akhirat, beserta keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya.

Sehubungan dengan terwujudnya karya ilmiah ini yang merupakan usaha dan doa penulis. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, *CROSS-DIRECTORSHIP* DAN LIPUTAN MEDIA TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOSIAL REPORTING* BANK UMUM SYARIAH PRIODE 2016-2018”**

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung



2. Bapak Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mengayomi mahasiswa dan memimpin fakultas dengan baik.
3. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A. selaku pembimbing I dan Bapak Agus Kurniawan, M.S.Ak. selaku pembimbing II dalam skripsi ini, yang dengan sangat sabar memberikan dukungan, masukan serta bimbingan secara terus menerus demi terselesaikan nya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu (Guru dan Dosen) yang telah mendidik serta memberikan ilmu dengan penuh ketekunan dan kesabaran.
6. Segenap STAF Civitas Akademika yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan informasi dalam penyelesaian studi penulis.
7. Sahabat sekaligus guru bagi penulis (Sinung Andria Adi Saputra), terima kasih atas semangat, motivasi dan ilmu yang telah dibagikan, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan kita.
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah F angkatan 2014 (Apri Alpriansah, Fredi Setiaji, Riski Ramadhani, Sinung Andria Adi Saputra, Yoga Prayuda, Nimas Ayu Putri Febiola), semoga kita selalu diberi kesehatan agar kelak bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
9. Rekan-rekan penulis angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.

10. Heri setiawan, Rusdi Effendi, Sahrul Iskandar, Jumadi Arya Pratama, Sugianto, Deni Diansyah, Iskandar Saputra, Ahmad Hafizi, Arohman, Riyan Hidayat, Nanda Saputra, Wahyudin Saputra, Ahmad Faisal, Heni Susanti, dan Siti Nurrohmah.
11. Semua pihak yang belum disebutkan yang berperan penting bagi pebulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua senantiasa mendapat balasan berupa pahala dari Allah SWT. Akhirnya, manusia ialah tempatnya khilaf, salah dan lupa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis harapkan kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik.

Bandar Lampung, 20 Desember  
2019  
Penulis,

**Agustomi**  
**NPM. 1451020006**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. <i>Agency Theory</i> .....	17
B. <i>Legitimacy Theory</i> .....	17
C. <i>Stakeholders Theory</i> .....	19
D. <i>Sharia enterprise Theory</i> .....	22
E. <i>Corporate social Responsibility (CSR)</i> .....	26
1. Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	26
2. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	30
F. <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .....	31
G. Ukuran Perusahaan.....	36
H. Ukuran Dewan Komisaris .....	38
I. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	42
J. <i>Cross-Directorship</i> .....	47

K. Liputan Media.....	48
L. Tinjauan Pustaka.....	51
M. Kerangka Berfikir dan Pengembangan Hipotesis.....	55
1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	55
2. Hipotesis Penelitian .....	56
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Jenis dan Desain Penelitian .....	65
Populasi dan Sampel.....	66
1. Populasi .....	66
2. Sampel .....	66
B. Variabel Penelitian .....	68
1. Variabel Endogen .....	68
2. Variabel Eksogen.....	69
C. Definisi Operasional.....	70
D. Metode Pengumpulan Data .....	71
E. Metode Analisis Data .....	72
1. Analisis Deskriptif.....	72
a. Analisis Statistik Deskriptif.....	72
b. Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS) .....	73
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>79</b>
A. Hasil Penelitian .....	79
B. Analisis Data.....	81
1. Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	81
2. Evaluasi Model Struktur ( <i>Inner Model</i> ).....	86
3. Pengujian Hipotesis .....	87
C. Hasil Analisis .....	92
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	92



2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	94
3. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	95
4. Pengaruh <i>Cross-Directorship</i> terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).....	97
5. Pengaruh Liputan Media terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) ..	98

## **BAB V. PENUTUP .....101**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Lampiran**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Statistik Perkembangan Perbankan Syariah.....	8
Tabel 2.1 Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan.....	33
Tabel 2.2 Indeks ISR Tema Produk dan Jasa .....	33
Tabel 2.3 Indeks ISR Tema Tenaga Kerja .....	34
Tabel 2.4 Indeks ISR Tema Sosial .....	34
Tabel 2.5 Indeks ISR Tema Lingkungan.....	35
Tabel 2.6 Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi .....	35
Tabel 2.7 Penelitian yang relevan .....	51
Tabel 3.1 Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia / Populasi.....	66
Tabel 3.2 Perolehan Sampel Penelitian .....	67
Tabel 3.3 Sampel Penelitian .....	68
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	70
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	79
Tabel 4.2 Outer Loadings ( <i>Weight of Loading</i> ) .....	82
Tabel 4.3 <i>Coefficients</i> .....	83
Tabel 4.4 <i>Collinearity Diagnostics</i> .....	83
Tabel 4.5 <i>Laten Variabel Corelation</i> .....	84
Table 4.6 <i>Path Coefficients</i> .....	85
Tabel 4.7 <i>Path Coeffiencient</i> (Mean, STDEV, T-Values) .....	87
Tabel 4.8 Hasil Keputusan Hipotesis Parsial .....	90
Tabel 4.9 <i>R Square</i> .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	55
Gambar 4.1 <i>Output Calculate Algorithm</i> .....	81
Gambar 4.2 <i>Output Bootstrapping</i> .....	86





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nilai Index *Islamic Social Reporting* (ISR)

Lampiran 2 Nilai *Content Analysis* BUS di Indonesia Berdasarkan Tema ISR

Lampiran 3 Nilai *Islamic Social Reporting* (ISR) pada BUS di Indonesia

Lampiran 4 Daftar Nilai Ukuran Perusahaan

Lampiran 5 Daftar Nilai Ukuran Dewan Komisaris

Lampiran 6 Daftar Nilai Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Lampiran 7 *Daftar Cross-Directorship*

Lampiran 8 Daftar Liputan Media

Lampiran 9 Rangkuman Nilai Variabel Penelitian

Lampiran 10 Hasil Olah Data *Partial Least Square* (PLS)



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. PENEGASAN JUDUL

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah-istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dan makna yang dimaksud serta dapat menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-Direktorship* dan Liputan Media Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah Priode 2016-2018”**

Adapun uraian dari pengertian istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variable dengan variabel yang lain.<sup>1</sup>
2. Ukuran perusahaan yang dimaksud adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dengan total asset perusahaan.
3. Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan.

---

<sup>1</sup>Sugiono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7.

4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan.
5. *Cross-directorship* berarti Dewan Komisaris yang memegang kedudukan pada dua atau lebih perusahaan.
6. Liputan media merupakan sarana dalam menyalurkan informasi tentang peristiwa yang terjadi saat ini secara tepat waktu.
7. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam penyajian informasi dalam bentuk sebuah laporan.
8. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah.

#### **A. ALASAN MEMILIH JUDUL**

Alasan-alasan penulis memilih judul ini ialah :

1. Alasan Obyektif
  - a. Menurut penulis, masalah ini sangat penting dan menarik untuk diteliti mengingat Perbankan Syariah merupakan sebuah lembaga yang harus dijadikan percontohan bagi perusahaan-perusahaan lain dalam pengelolaan perusahaan diantaranya pengelolaan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
  - b. Dengan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan referensi kepada perusahaan-perusahaan untuk menjadi gambaran dalam membangun citra positif perusahaan.



## 2. Alasan Subyektif

Alasan subyektif permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dewasa ini, perusahaan mulai dihadapkan dengan konsep *Tripple Bottom Line* (TBL) tidak hanya konsep *Single Bottom Line* (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan. *Tripple Bottom Line* (TBL) tersebut meliputi aspek keuangan, kehidupan sosial, dan lingkungan hidup. Konsep *Tripple Bottom Line* (TBL) sangat berbeda dengan konsep *Single Bottom Line* (SBL) karena konsep *Single Bottom Line* (SBL) hanya menekankan pada laba maksimal yang diperoleh perusahaan tanpa memperhatikan aspek lainnya. Aspek lain yang dimaksud tersebut misalnya tanggung jawab sosial yang pada umumnya disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Khoirudin (2013) mengemukakan bahwa secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya.

Dilaksanakannya praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mencantulkannya dalam laporan tahunan maka hal tersebut akan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan citra baik dari para investor maupun masyarakat.

Adanya citra baik dari investor dan masyarakat maka diharapkan perusahaan mendapatkan kepercayaan bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya perusahaan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

Secara teoretis, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan inti dari etika bisnis dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain yang berkepentingan di antaranya adalah masyarakat. Tidak hanya masyarakat dan pemegang saham, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Hadi mengemukakan bahwa *social responsibility* dengan perjalanan waktu menjadi tiga bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif.

---

<sup>2</sup>Khoirudin, Amirul, "*Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia".(Skripsi Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 30.

<sup>3</sup>Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011), h. 5.

Khusus dampak negatif memicu reaksi dan protes *stakeholder*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran *social responsibility* sebagai salah satu strategi legitimasi.

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya baik dari kualitas maupun kuantitas. Pelaporan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini menjadi bersifat wajib (*mandatory*). Sedangkan untuk pelaporan sosial syariah, *Islamic Social Reporting* (ISR) tetap bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini menyebabkan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap perusahaan atau perbankan syariah tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standar baku secara syariah tentang pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) syariah.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia memberikan respon baik terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya memuat tentang tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada pasal 66 ayat (2) dan pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, tidak hanya laporan keuangan tetapi juga diwajibkan mencantumkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial

---

<sup>4</sup>Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 65.



dan lingkungan. Pasal 74 juga menjelaskan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam.<sup>5</sup> Selain itu, pelaksanaan fungsi sosial juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial akan mendapatkan manfaat. Salah satunya yaitu akan mendapatkan citra baik dari masyarakat.<sup>6</sup> Hadi (2011) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dengan melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara lain menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, transparansi, wujud *social responsibility*, membangun *image* perusahaan, membangun *image* terhadap *mutual fund* dan *stakeholder*, mendukung tingkat kembalian investasi, membangun *image* terhadap investor supaya investasi saham lebih aman.<sup>7</sup> Azheri (2011) mengemukakan bahwa bagi perusahaan yang konsisten menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari *stakeholders*-nya (*corporate image*) terhadap perusahaan yang bersangkutan.<sup>8</sup> Meskipun konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 74.

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 4 ayat (2 dan 3).

<sup>7</sup>Nor Hadi, *Op.Cit.* h. 156.

<sup>8</sup>Azheri, *Op.Cit.* h. 6.

mempunyai sejarah yang panjang dan bermacam-macam, namun masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia. Sebagai contoh yaitu konflik antara masyarakat dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya (2016) yang di tuntutan masyarakat atas transparasi pengungkapan CSR.

Selain tuntutan internal perusahaan itu sendiri, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga tidak terlepas dari wujud pertanggungjawaban perusahaan atas dampak lingkungan sebagai akibat aktivitas perusahaannya. Beberapa fakta empiris menunjukkan banyaknya perusahaan pertambangan yang telah merusak tatanan lingkungan dan struktur sosial masyarakat. Seperti kasus lumpur lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan IPT Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Bayat, dan lain sebagainya (Azheri, 2011)<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua perusahaan di Indonesia melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya berkembang dengan pesat dalam ekonomi konvensional saja, namun juga dalam ekonomi syariah. Khoirudin (2013) menyatakan bahwa ekonomi syariah sudah mempunyai konsep *Corporate Social*

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 6 *et seq.*

*Responsibility* (CSR) sebelum dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah.<sup>10</sup> Seperti yang dikemukakan Widiawati (2012) bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami. Perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit saja, seharusnya juga memiliki orientasi untuk membantu kesejahteraan masyarakat juga. Oleh karena itu, seharusnya perbankan syariah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>11</sup>

Statistik perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sampai dengan bulan Desember 2018 menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin tersebar di seluruh Indonesia dengan 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor 2.229 unit, dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Total aset perbankan syariah di Indonesia telah mencapai Rp. 477.327 miliar.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**

S

t	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
	BUS	12	12	12	13	14
	Kantor BUS	2.163	1.990	1.807	1.849	2.229
	UUS	22	22	22	21	20

<sup>10</sup>Khoirudin, *Op.Cit.* 39.

<sup>11</sup>Widiawati, Septi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011". (Skripsi.Program Strata Satu Universitas Diponegoro, 2012). h. 13.

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, 2019, (On-Line) tersedia di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).



## atistik Perkembangan Perbankan Syari'ah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah, 2019)

Haniffa (Maulida dkk., 2014) menyatakan pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam indeks GRI meliputi Profil dan Strategi Organisasi, Lingkup Ekonomi, Lingkup Lingkungan dan Lingkup Sosial. Pengukuran tersebut dianggap kurang tepat karena perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan informasi dan membuktikan bahwa perusahaan syariah tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan Islam. Digunakannya *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) tentu belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam, seperti belum terbebasnya dari unsur *riba*, *ghharar*, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam.<sup>13</sup>

Hal ini tentu saja berbeda dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang merupakan pengembangan tanggung jawab sosial yang telah menggunakan prinsip syariah di dalamnya. Peneliti ekonomi syariah saat ini banyak menggunakan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) sebagai pengukur *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan syariah. *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR) berisi standar syariat Islam lembaga keuangan dan industri yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Fitria

---

<sup>13</sup>Maulida, et.al., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)". Dalam *Accounting Analysis Journal*. Vol. 9. No. 112, 2014.

dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan perspektif Islam. Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia sudah cukup baik namun belum optimal yakni rata-rata 50% dari indeks ISR telah diungkapkan (Khoirudin dalam Fauziah, 2013).<sup>14</sup>

Penelitian Assegaf *et. al* (2012) menemukan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* adalah *managerial ownership*. Penelitian Khoirudin (2013) menemukan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah ukuran Dewan Komisaris. Sementara itu, penelitian Ningrum (2013) menemukan dalam penelitiannya bahwa kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian ini memperkaya penelitian Khoirudin (2013) dan Assegaf *et. al* (2012) untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

<sup>14</sup>Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho Jayanto. "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*".Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol.5,No.1, Maret 2013, pp.12-20. Mengutip Khoirudin, Amirul, "Corporate Governance dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia".(Skripsi Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang, 2013). h. 30.

Penelitian ini akan mencoba menguji apakah variabel-variabel ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship* dan Liputan Media. Sejauh pengetahuan peneliti, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah variabel *Cross-directorship* dan Liputan Media untuk menguji pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.

Faktor yang diduga mempengaruhi *Islamic Corporate Reporting* (ISR) antara lain adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula modal yang ditanamkan sehingga sumber daya dan dana yang besar dalam perusahaan akan menimbulkan permintaan yang lebih luas akan informasi pelaporan perusahaannya.

Faktor lain yang diduga juga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Ukuran Dewan Komisaris yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Terkait dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social*

*Reporting* (ISR) dapat meminimalkan informasi yang dapat disembunyikan atau direkayasa oleh manajemen.

Dewan Pengawas Syariah juga diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dewan Pengawas Syariah merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah *Cross-Directorship*. *Cross-directorship* berarti Dewan Komisaris yang memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan (Assegaf *et.al.*).<sup>15</sup> Semakin besar *cross-directorship*, maka semakin besar distribusi informasi yang diperlukan. Sehingga Dewan Komisaris memperoleh informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Ketika Dewan Komisaris hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan, maka tidak akan ada distribusi informasi yang

---

<sup>15</sup> Assegaf, et.al. "Bank Syariah di Indonesia: *Corporate Governance* dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*)". (*Conference in Business, Accounting and Management*. Vol. 1, No. 1 Desember 2013, pp. 255-267).



diperlukan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memperoleh informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi manajemen dan informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah.

Selanjutnya yaitu faktor Liputan Media di duga berpengaruh pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dimana, melalui media masyarakat dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan apakah perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai kontribusi perusahaan untuk melestarikan lingkungan atau tidak. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan merupakan tujuan perusahaan. Hal ini yang membuat perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tanggung jawabnya serta mengungkapkannya dalam bentuk laporan *Corporate Social Responsibility*, dengan tujuan mendapatkan *image* baik, yang nantinya dapat disampaikan kepada publik oleh media melalui liputan yang mereka lakukan terhadap perusahaan bersangkutan guna mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurut penelitian Aulia dan Agustina (2015) menyatakan media menjadi alat publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan (*image*) publik tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan perusahaan. Dengan kata lain media merupakan alat yang dapat menggiring opini publik ke arah positif atau negatif tergantung dengan apa yang media sampaikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Aulia, Agustina, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media Terhadap *Environmental Disclosure*." *Accounting Analysis Journal* 4 (3). <https://doi.org/ISSN 2252-6765.2015>.

Berdasarkan fenomena maraknya praktik CSR dalam dunia bisnis termasuk industry perbankan syariah dan pentingnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah serta berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis mencoba meneliti **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Pengawas Syariah, Cross-Directorship dan Liputan Media terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*”**. (Studi Empiris Pada bank Umum Syari’ah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan Priode 2016-2018).

#### C. RUMUSAN MASLAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, *Cross Directorship* serta Liputan Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* secara parsial?
2. Apakah ukuran perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, *Cross Directorship* serta Liputan Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* secara simultan?

#### D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, *Cross Directorship*

serta Liputan Media terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* secara parsial.

- b. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross Directorship* serta Liputan Media terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* secara simultan.

## 2. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan materi *Islamic Social Reporting (ISR)* dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-directorship* dan Liputan Media terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* sehingga dapat menambah kajian ilmu yang berkaitan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

### b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan dapat memberikan masukan serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi perusahaan dalam hal pengungkapan laporan tahunan.

c. Bagi Investor

Adanya peningkatan informasi mengenai perusahaan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor pada saat melakukan keputusan investasi.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. *Agency Theory***

Menurut Brigham dan Houston (2006), mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen dan principal.<sup>17</sup> Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen suatu perusahaan, sedangkan untuk prinsipal adalah pemilik perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka.

Teori keagenan merupakan teori dasar yang digunakan dalam praktik bisnis perusahaan. Teori ini berhubungan erat dengan faktor ukuran perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dalam penelitian ini. Dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan.

#### **B. *Legitimacy Theory***

Legitimasi masyarakat merupakan factor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan. Hal tersebut dapat di jadikan wahana untuk mengontruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri perusahaan di hadapan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan

---

<sup>17</sup>.Brigham, Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), h. 59.

psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungannya baik secara fisik ataupun non fisik. (O'Donovan, 2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang di inginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan guna bertahan hidup (*going concern*).

Bersamaan dengan perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada, dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi mengalami pergeseran (Dowling, 1975).<sup>18</sup> Perubahan nilai dan norma social dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia juga menjadi motovator perubahan legitimasi perusahaan idisamping juga dapat imenjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan (Linblom,1994)<sup>19</sup>

Gray *et. al.* (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “*a system-oriented view of organization and society, permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organization, the state, individuals and group*”. Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada

---

<sup>18</sup>Nor Hadi, *Op.Cit.* h. 87.

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 88.

masyarakat, operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat.<sup>20</sup>

Deegan (2002) menyatakan legitimasi sebagai: *"...a system oreinted perspective the entity is assumed to influenced by and in turn to have influence upon, the society in which it operates Corporate disclosure are considered to represent one important means by which management can influence external perceptions about organisation"*.

Defenisi tersebut mencoba menggeser secara tegas perspektif perusahaan kearah stakeholder orientation (society). Batasan tersebut mengisaratkan bahwa legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusaan yang lebih menitik beratkan pada stakeholder iperspective (masyarakat dalam arti luas).

### **C. Stakeholders Theory**

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap ipara pemilik (Shareholder) sebagaimana terjadi iselama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut tanggungjawab social (Social responsibility). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta ketimpangan social yang terjadi (Harahap, 2002).<sup>21</sup> Untuk itu,tanggungjawab perusahaan yang semula hanya di ukur sebatas pada indicator ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini

---

<sup>20</sup>Nor Hadi, *Ibid.* h. 88.

<sup>21</sup>Nor Hadi, *Ibid.* h. 93.

harus bergeser dengan memperhitungkan factor-faktor social (social dimentions) terhadap stakeholder, baik internal maupun external.

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun external yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun external, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja lingkungan perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Hummels (1998) “.....(stakeholder are) individuals and a group who have a legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization's practices, policies and actions.”

Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karna mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.



Jones, Thomas dan Andrew (1999) menyatakan bahwa pada hakikatnya stakeholder theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :<sup>22</sup>

1. The corporation has relationship with many constituency groups (stakeholder) that effect and are affected by its decisions (Freeman, 1984).
2. The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and autcomes for the firm and its stskeholder.
3. The interest of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set of interest is assumend to dominate the others (Clakson,1995; Donaldson dan Preston 1995).
4. The theory focuses on managerial decisison making (Donaldson dan Preston 1995).

Berdasarkan pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan isocial (social setting) sekitarnya. Perusahaan iperlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya idalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu usaha dan jaminan going concern (Adam.C.H, 2002).<sup>23</sup>

Esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksi denagan teori legitimasi yang mengisyaratkan bhwa perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap dengan masyarakat (pulik)

---

<sup>22</sup>Nor Hadi, *Ibid*, h. 94.

<sup>23</sup>Nor Hadi, *Ibid*, h. 95.

sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata di ukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah memperhitungkan factor social (social factors) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah social kemasyarakatan (stakeholder orientation).

#### **D. *Sharia Enterprise Theory***

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan Enterprise Theory (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholder yang lebih luas. Berbeda dengan entity theory yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik.<sup>24</sup>

Konsep enterprise theory lebih menyerupai stakeholders theory, karena kedua teori ini mengakui keberadaan stakeholder sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan.

Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, rahmatan lil alamin, dan maslahah), karena dalam konsep enterprise theory dan

---

<sup>24</sup>Meutia, I, *Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah* (Universitas Brawijaya Malang: 2009), h. 40.

stakeholders theory dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua stakeholder (manusia).

Menurut para ahli, enterprise theory ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2007) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari'ah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.<sup>25</sup>

Namun demikian, enterprise theory perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah Syariah Enterprise Theory (SET). Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Menurut SET, stakeholders meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi

---

<sup>25</sup>Triyuwono, I, Mengangkat “sing liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. (Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007).

adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect- stakeholders.

Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-keuangan (non-financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang



tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.<sup>26</sup>

Meutia (2010) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah Syariah Enterprise Theory (SET). Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Syariah enterprise theory merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu agency theory, legitimacy theory, dan stakeholder theory. Agency theory yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan principal (pemegang saham). Legitimacy theory merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan stakeholder theory merupakan teori yang mengutamakan kepentingan stakeholders, akan tetapi stakeholders yang dimaksud dalam teori

---

<sup>26</sup>Mansur, S. "Pelaporan CSR Perbankan Syariah Dalam Persepektif Syariah *Enterprise Theory*" (Skripsi, Program Strata Satu Universitas Hasanudin Makasar, 2012), h. 41-44.

tersebut adalah manusia. Berbeda dengan stakeholders yang dimaksud dalam syariah enterprise theory yaitu Allah, manusia, dan alam.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-Anbiya: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

## **E. Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **1. Definisi Corporate Social Responsibility**

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban kepada masyarakat yang ditanggung oleh perusahaan.<sup>28</sup> Menurut Stephen R. Covey, kata *responsibility* terdiri dari dua kata, yaitu *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan).<sup>29</sup> Hughes dan Kapoor mengatakan bahwa tanggung jawab social perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Baron mendefinisikan tanggung jawab social perusahaan sebagai komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan

---

<sup>27</sup>Meutia, I. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)* (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010), h. 49.

<sup>28</sup>Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kalaborasi dalam dunia yang kompetitif* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 205.

<sup>29</sup>Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis: pengenalan praktis dan studi kasus* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109.

O.C. Ferrel, G. Hirt dan Linda Ferrell mengatakan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.<sup>30</sup>

*World Business Council for Sustainable Development* mengatakan tanggung jawab sosial sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat. *European Commission* mengatakan tanggung jawab sosial sebagai sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan. *CSR Asia* mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*. Robbins dan Coulter mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban perusahaan diluar yang dituntut oleh

---

<sup>30</sup>Poerwanto, *New Business Administration* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 84.

hukum dan pertimbangan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Poerwanto tanggung jawab sosial perusahaan adalah tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika.<sup>32</sup>

*Corporate Social responsibility* dalam perspektif islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi.<sup>33</sup> CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, konsep CSR sudah ada dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2): 205

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

*“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”*

---

<sup>31</sup>Jono, Munandar, M. et.al, *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi* (Bogor: IPB Press, 2014), h. 58.

<sup>32</sup>Poerwanto, *Op. Cit.* h. 85.

<sup>33</sup>Junaidi, “Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Social reporting Index” dalam Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 16 No. 1, Januari 2015, (STIE Muhammadiyah Palopo Sulawesi Selatan), h. 76.

Q.S. Al-A'rāf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*

Ayat-ayat di atas mengajarkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan melarang segala kegiatan yang merusak di muka bumi. Segala kegiatan yang kita jalankan, harus menjamin kelestarian alam. Dalam alQur'an juga banyak memerintahkan

untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh untuk orang lain, yang artinya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai sosial.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَآتَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi*



*dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”*

## **2. Manfaat Corporate Social Responsibility**

Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam artikel yang berjudul Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives, Branco dan Rodrigues (2006) membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi:<sup>34</sup>

- a. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.
- b. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.

---

<sup>34</sup>Mursitama, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, (INDEF, 2011), h. 27.

- c. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
- d. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik.

Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan CSR sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.
- b. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.
- c. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR secara publik merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

#### **F. *Islamic Social Reporting (ISR)***

Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting (ISR)* untuk mengukur *Corporate Social Responsibility (CSR)* institusi keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab

---

<sup>35</sup>*Ibid.* h. 30.

sosial.<sup>36</sup> *Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR muncul pada tahun 2002 dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti selanjutnya. Secara khusus, indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait dengan lingkungan, hak minoritas dan karyawan.<sup>37</sup> Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) diyakini sangat cocok digunakan karena dianggap sesuai dengan perspektif Islam. Indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kerja sosial institusi bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang digunakan oleh Fauziah (2013).

Adapun indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam penelitian ini terdiri dari enam tema yang masing-masing dari tema tersebut terdiri dari beberapa *item*. Tema yang pertama adalah tema investasi dan keuangan. Tema ini

---

<sup>36</sup>Taufik, Marlina Widiati, Rofiqoh. "Pengaruh IGS, Leverage dan Profitabilitas terhadap ISR", (Jurnal Manajemen Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.2 Juni 2015), h. 6.

<sup>37</sup>Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks". (*Symposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010), h. 2.

berisi mengenai kegiatan keuangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun *item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan**

No	Item Indeks ISR Tema Investasi dan Keuangan
1	Aktifitas Riba
2	Gharar
3	Zakat
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5	<i>Current value balance sheet</i>
6	<i>Value added statements</i>

Tema yang kedua dalam indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah tema produk dan jasa. Tema ini berisi tentang produk dan jasa perusahaan dan terdiri dari empat item. *Item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Indeks ISR Tema Produk dan Jasa**

No	Item Indeks ISR Tema Produk dan Jasa
1	Status halal atau syariah dalam produk
2	Pengembangan produk
3	Peningkatan pelayanan
4	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturanyang berlaku

Tema yang ketiga adalah tema tenaga kerja. Tema ini terdiri dari enam *item* yang menjelaskan mengenai perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang dipekerjakan. *Item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Indeks ISR Tema Tenaga Kerja**

No	Item Indeks ISR Tema Tenaga Kerja
1	Karakteristik pekerjaan
2	Pendidikan dan pelatihan
3	Kesempatan yang sama
4	Kesehatan dan keselamatan kerja
5	Lingkungan kerja
6	Perekrutan khusus

Tema keempat adalah tema sosial. *Item-item* dalam tema ini berisi mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa *item* dalam tema ini sudah sesuai dengan prinsip syariah antara lain yaitu pemberian donasi (*sadaqoh*), wakaf dan pinjaman untuk kebajikan (*Qard Hasan*). *Item* secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4**  
**Indeks ISR Tema Sosial**

No	Item Indeks ISR Tema Sosial
1	<i>Shadaqoh</i> /donasi
2	Wakaf
3	<i>Qardh hasan</i>
4	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah
5	Pendidikan
6	Bantuan kesehatan
7	Pemberdayaan ekonomi
8	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
9	Pembangunan atau renovasi masjid
10	Kegiatan kepemudaan
11	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng dan lain-lain)
12	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain

Tema lingkungan merupakan tema kelima indeks ISR dalam penelitian ini. Tema ini terdiri dari tujuh *item* yang berisi mengenai



hubungan perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. *Item* tema ini akan disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Indeks ISR Tema Lingkungan**

No	Item Indeks ISR Tema Lingkungan
1	Kampanye go green
2	Konservasi lingkungan
3	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
4	Polusi
5	Perbaikan dan pembbuatan sarana umum
6	Audit lingkungan
7	Kebijakan manajemen lingkungan

Tema indeks ISR yang terakhir adalah tema tata kelola organisasi yang terdiri dari lima belas *item* mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang dilakukan. *Item* tema ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2.6**  
**Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi**

No	Item Indeks ISR Tema Tata Kelola Organisasi
1	Profil dan strategi organisasi
2	Struktur organisasi
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
5	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
6	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
7	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
8	Penanganan benturan kepentingan
9	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
10	Penerapan fungsi audit intern
11	Penerapan fungsi audit ekstern
12	Batas maksimum penyaluran dana
13	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
14	Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
15	Etika perusahaan

## G. Ukuran Perusahaan

Menurut Bambang Riyanto (2010) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan di lihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aktiva.<sup>38</sup> Secara teoretis, perusahaan dengan jumlah karyawan yang lebih banyak akan menghadapi tekanan politis dari stakeholder. Salah satunya berupa tuntutan dari karyawan atas hak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan operasi perusahaan. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis. Maulida dkk (2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan yang dimaksud adalah besar atau kecilnya perusahaan yang diukur dengan total asset perusahaan.

Perusahaan besar mengeluarkan biaya produksi yang besar, aktivitas yang lebih padat, dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan proporsi pemegang saham yang besar kemungkinan memiliki kepentingan tersendiri dengan program sosial perusahaan daripada perusahaan sedang ataupun perusahaan kecil, sehingga menyebabkan tekanan politis yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya kepada publik. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.<sup>39</sup> Namun, dalam penelitian ini ukuran

---

<sup>38</sup>Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, ed.4 (BPFE-Yogyakarta: 2010), h. 343.

<sup>39</sup>Maulida, et. al., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*". Dalam *Accounting Analysis Journal*. Vol. 9. No. 112, 2014.

perusahaan diukur dengan total aset yang kemudian dilogaritma naturalkan ( $\ln$ ). Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak.

Adanya pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial dalam laporan keuangan, maka secara tidak langsung akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu memperoleh citra baik dari masyarakat dan terhindar dari biaya yang cukup besar atas tuntutan masyarakat. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat. Selain itu, untuk perusahaan yang lebih besar akan memperoleh *public demand* yang lebih tinggi terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Alasan lain adalah perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang luas untuk mengurangi biaya tersebut.

Lebih banyak pemegang saham, lebih banyak juga pengungkapan karena ada tuntutan dari pemegang saham dan para analis pasar modal.

## H. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Sembiring (2005) Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah Dewan Komisaris yang ada pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002/ Pasal 16 ayat 1). Wewenang dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Khoirudin, *Op. Cit.* h. 39.

Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan *Corporate Social Reporting* (CSR) dengan wewenang tersebut.

Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu (FCGI dalam Khoirudin,2013):

#### 1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menganut *One Tier System* adalah Amerika Serikat dan Inggris.

#### 2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.



Negara-negara yang menganut sistem ini adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang dan Indonesia.<sup>41</sup>

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan

---

<sup>41</sup>*ibid*, h. 41.

manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*);

4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi dan pertanggung jawaban (*responsibility*) atas hal ini;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.<sup>42</sup>

Secara umum, Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Dewan Komisaris diperbolehkan memiliki akses pada informasi perusahaan untuk mengatasinya. Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris (KNKG dalam Khoirudin, 2013). Dikarenakan Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam suatu perusahaan maka Dewan Direksi mendapatkan informasi dari Dewan Direksi.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan

---

<sup>42</sup>Forum for Corporate in Indonesia, *Tugas-tugas Utama Dewan Komisaris*, (Online), tersedia di : ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org))

terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini hanya diwajibkan setiap perusahaan memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris, tidak ada ketentuan untuk batas maksimumnya.<sup>43</sup>

#### **I. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan DSN di lembaga keuangan Syariah. DPS diangkat dan diibberhentikan di lembaga keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>44</sup>

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013).<sup>45</sup>

Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

---

<sup>43</sup>Wulan, Suci Maharesti, "Pengaruh Dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas dan lingkungan kerjaterhadap pengungkapan isr" (Skripsi Program strata satu UIN Yogyakarta, 2018), h. 39.

<sup>44</sup>Muhammad Firdaus et. al, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan,2007), h. 16.

<sup>45</sup>Khoirudin, *Op.Cit*, h. 55.

mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurangkurangnya sebanyak dua orang. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 pasal 48 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam.

Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibuat untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu bagian penting dari perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat

Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>46</sup>

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:<sup>47</sup>

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang

---

<sup>46</sup>Lakharis Inuzula, Hasan Basri, Shabari,. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Komisari Dalam Pengungkapan ISR" (Jurnal magister Akuntansi, Vol. 4, No. 4), h. 70.

<sup>47</sup>Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah, (On-line), tersedia di <http://badilag.mahkamahagung.go.id>



diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain itu, dalam Surat Keputusan tersebut juga berisi tentang struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009

pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain:<sup>48</sup>

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
3. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di atas maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah (DPS)

---

<sup>48</sup>Peraturan Bank Indonesia, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47.

mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana *zakat*, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (*qard*) yang dapat dikategorikan sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR) dan Dewan Pengawas Syariah *Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

#### **J. Cross-Directorship**

*Cross-directorship* adalah Dewan Komisaris yang memangku kedudukan pada dua atau lebih perusahaan (Assegaf *et. al*, 2012). *Cross-directorship* diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada perusahaan lain dengan jumlah Dewan Komisaris di perusahaan tersebut. Dewan Komisaris yang memangku jabatan pada lebih dari satu perusahaan ini merupakan fungsi ketergantungan sumber daya (*resources dependence*). Fungsi *resources dependence* memandang dewan sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting.

Peran ini sangat berguna mengingat sumber daya yang langka justru dapat menciptakan keuntungan yang kompetitif. Hubungan yang bernilai, jarang, dan secara social kompleks yang dikembangkan oleh anggota dewan akan sulit ditiru oleh perusahaan lain sehingga dapat menjadi suatu sumber keuangan kompetitif. Anggota dewan yang

melakukan *cross-directorship* memiliki pengalaman dan informasi lebih luas yang diharapkan akan berguna bagi perusahaan dibandingkan dengan anggota dewan yang tidak melakukan *cross-directorship*. Terdapat asumsi bahwa *cross-directorship* akan menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Cross-directorship* akan membuat informasi menjadi lebih transparan karena digunakan sebagai perbandingan dari pengetahuan organisasi lain.<sup>49</sup>

Ketika Dewan Komisaris hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan (*unitary board*), maka tidak akan ada distribusi informasi yang diperlukan. Selain itu, Dewan Komisaris tidak memperoleh informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi manajemen dan informasi dari perusahaan lain yang dapat memberikan nilai tambah. Akan tetapi, apabila Dewan Komisaris memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan, maka akan mudah memperoleh segala informasi dari perusahaan lain yang dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah perusahaan.

## **K. Liputan Media**

Menurut Cangra (2010) media adalah alat atau saran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khlayak, sedangkan media massa sendiri alat yang digunakan dalam

---

<sup>49</sup> Assegaf, et.al. "Bank Syariah di Indonesia: *Corporate Governance* dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*)" (*Conference in Business, Accounting and Management*. Vol. 1, No. 1 Desember 2013, pp. 255-267).

penyampaian pesan dari sumber kepada khlayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.<sup>50</sup>

Liputan media merupakan sarana dalam menyalurkan informasi tentang peristiwa yang terjadi saat ini secara tepat waktu. Dalam kehidupan sehari-hari liputan media sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa dan isu-isu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kasus kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik karena disengaja ataupun karena faktor alam. Ketika suatu kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah tangan manusia untuk kepentingan pribadi dan dampak yang ditimbulkannya merugikan masyarakat disekitar lingkungan tersebut, disinilah peran liputan media dibutuhkan untuk mengangkat penyebab serta tindakan yang harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada. Dalam menjalankan jurnalisme pada kasus mengenai kerusakan lingkungan media harus mampu memisahkan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang seringkali ikut bermain dalam kasus lingkungan (Pratiwi 2013)<sup>51</sup>

Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang perannya sangat dibutuhkan dalam mengawasi kinerja suatu perusahaan. Melalui liputan media masyarakat dapat dengan mudah mengawasi kinerja suatu perusahaan melalui isu-isu yang terkandung di dalam informasi yang

---

<sup>50</sup>Hafied, Cangra, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), h. 123.

<sup>51</sup>Pratiwi, Kurnia Putri. "Enviromental Incident, Pemberitaan Media Dan Praktik Pengungkapan Lingkungan (Enviromental Disclosure) (Studi Pada *Sustainability Report Asia Pulp and Paper Co., Ltd.*" Universitas Diponegoro, 2013). h. 77.



disampaikan. Menurut Aulia dan Agustina (2015) Liputan media yang diterima oleh perusahaan merupakan media bagi masyarakat dalam mengawasi kinerja lingkungan perusahaan. Dengan kata lain ketika suatu aktivitas perusahaan terutama yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan diliput oleh media, maka hal tersebut akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan serta isu-isu apa yang tengah terjadi pada perusahaan tersebut.

Ketika masyarakat menganggap suatu perusahaan melakukan aktivitas lingkungan dengan baik dan isu-isu yang muncul berkaitan dengan isu lingkungan disampaikan secara baik oleh liputan media maka opini yang muncul berkaitan dengan *image* perusahaan dalam masyarakat akan baik pula, hal tersebut terjadi karena masyarakat tergiring dengan informasi yang dikemas secara apik oleh liputan media. Sebaliknya ketika suatu liputan media menyampaikan informasi bahwa suatu perusahaan tidak melakukan aktivitas lingkungan dengan baik maka opini yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan *image* perusahaan akan buruk. Oleh karena itu informasi yang disampaikan oleh Liputan Media akan mempengaruhi opini masyarakat dan berdampak pada *image* perusahaan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Aulia, Febri Zaini, dan Linda Agustina. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan, Dan Liputan Media Terhadap *Environmental Disclosure*." (*Accounting Analysis Journal*, Vol.4, No.3. 2015). h. 50.

## L. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7**  
**Penelitian yang relevan**

No	Penulis	Judul	Variabel Dependen	Hasil
1	Septi Widiawati (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Islamic Social Reporting</i> Perusahaan-Perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011	<i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel (ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan jenis bank) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
2	Yasmin Umar Assegaf, Falikhatun dan Salamah Wahyuni (2012)	Bank Syariah di Indonesia: Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami ( <i>Islamic Social Responsibility Disclosure</i> )	<i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Crossdirectorship dan ownership Diffusion terhadap ICSR. Selain Itu variabel boardsize berpengaruh terhadap ICSR.
3	Amirul Khoirudin (2013)	<i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada	<i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki

		Perbankan Syariah di Indonesia		pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> pada perbankan syariah di Indonesia.
4	Puji Lestari (2013)	<i>Determinants Of Islamic Social Reporting In Syariah Banks: Case Of Indonesia</i>	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> . Sedangkan umur perusahaan dan <i>proportion of independen commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .
5	Ratna Aditya Ningrum (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable kinerja keuangan,

		Pengungkapan <i>ISR</i>		<p>kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>. Secara parsial, variable kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>. Sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>.</p>
6	Aldheita Purnasanti Maulida, Agung Yulianto dan Asrori (2014)	Analisis Faktorfaktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> perusahaan syariah di JII. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap</p>

				pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR). Sedangkan variable profitabilitas dan variable kinerja lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).
7	Aulia dan Agustina (2015)	Pengaruh karakteristik perusahaan, kinerja lingkungan dan liputan media terhadap environmental Disclosure.		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, liputan media memiliki pengaruh positif terhadap Enviromental Disclosure, sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap Enviromental Disclosure.

Sumber : Berbagai Penelitian (Data Diolah, 2019)

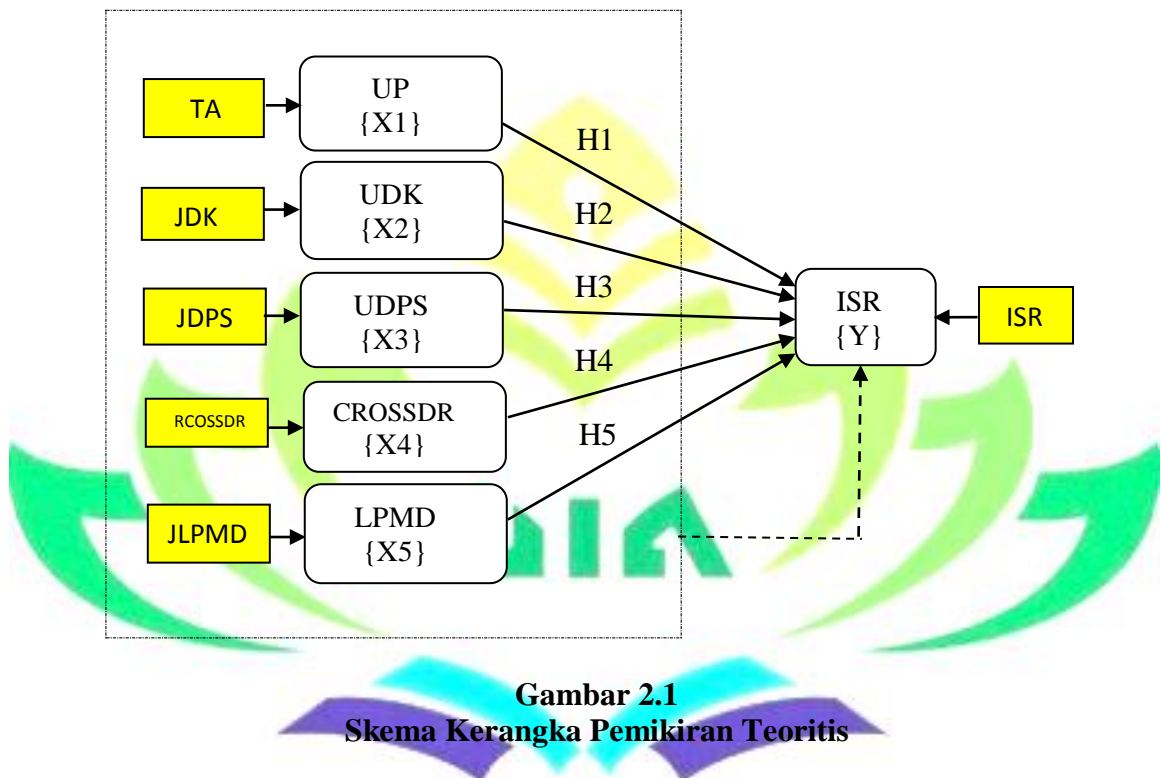
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu : Pada Penelitian terdahulu variable x bersifat universal, sedangkan pada penelitian ini variable x bersifat lebih spesifik. Serta pada metode analisis data yang di gunakan pada penelitian terdahulu menggunakan Aplikasi SPSS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan aplikasi Smart PLS 2.0.



## M. Kerangka Berfikir dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji variable-variabel Eksogen, sehingga untuk mengetahui kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Keterangan :

————— = Pengaruh Secara Parsial

----- = Pengaruh Secara Simultan

UP adalah Ukuran Perusahaan

UDK adalah Ukuran Dewan Komisaris

UDPS adalah Ukuran Dewan Pengawas Syariah

CROSSDR adalah *Cross-Directorship*

LPMD adalah Liputan Media

ISR adalah *Islamic Social Reporting*

TA adalah Total Aset

JDK adalah Jumlah Dewan Komisaris

JDPS adalah Jumlah Dewan Pengawas Syariah

RCROSSDR adalah Rasio *Cross-Directorship*

JLPMD adalah Jumlah Liputan Media

## 2. Hipotesis Penelitian

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia telah mengalami peningkatan termasuk perbankan syariah. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela kini menjadi bersifat wajib. Sedangkan untuk pelaporan sosial syariah tetap bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan pelaporan tanggung jawab sosial setiap perusahaan tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standar baku secara syariah tentang pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah.

Penelitian ini lebih mengacu pada penelitian Khoirudin (2013) dimana faktor ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), sedangkan variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Penambahan tiga variabel baru dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, *cross-directorship*,

dan liputan media juga diprediksi memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang diproksikan dengan total aset perusahaan (Maulida dkk.,2014). Total aset perusahaan diperoleh dari laporan keuangan akhir tahun periode dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), dimana jika ukuran perusahaan semakin besar maka informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan perusahaan semakin banyak. Pengungkapan informasi yang semakin banyak maka dapat mengurangi biaya keagenan dalam suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2013) mengenai ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada bank syariah yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial secara Islam. Assegaf *et. al* (2012) melakukan penelitian mengenai *board size*, *cross-directorship*, *managerial ownership*, dan *ownership diffusion* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Raditya (2012) meneliti penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin banyak pula informasi perusahaan yang akan diungkapkan termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan demikian, penulis berasumsi dalam penelitian ini bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

b. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Variabel tersebut diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin besar ukuran Dewan Komisaris maka pengawasan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik tersebut, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dapat meminimalisasi informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan ukuran Dewan Komisaris yang besar maka dapat mendorong manajemen selaku pelaku operasi perusahaan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2010) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan umur perusahaan terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh



terhadap *corporate social responsibility disclosure*.<sup>53</sup> Selain itu, Chariri (2012) mengenai pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Reporting* (CSR) pada bank syariah di Asia menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Reporting* (CSR) pada bank syariah di Asia.<sup>54</sup> Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan sangat penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan informasi kepada *stakeholders*. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis berasumsi dalam penelitian ini bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

c. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan.

---

<sup>53</sup>Utami, Indah Dewi dan Rahmawati. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (*Jurnal Akuntansi Manajemen*. Vol. 21, No. 3 Desember 2010).

<sup>54</sup>Chariri, Anis dan Charles Pramudita Ertanto. "Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Diponegoro *Journal Of Accounting*, 2012), h. 1. *et. seq.*

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia karena perusahaan patuh terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan adanya pengawasan yang semakin efektif maka manajemen dapat melakukan operasi perusahaan sesuai dengan prinsip syariah serta menjalankan fungsi bank syariah untuk turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Ningrum (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan uraian diatas dan teori ataupun penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis berasumsi dalam penelitian ini variable Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

H3 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

d. Pengaruh *Cross-directorship* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

*Cross-directorship* merupakan Dewan Komisaris yang memangku kedudukan pada dua atau lebih perusahaan. Ketika Dewan Komisaris hanya memiliki kedudukan pada satu perusahaan maka tidak akan ada distribusi informasi yang diperlukan. Semakin besar *cross-directorship* maka semakin besar distribusi informasi yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana dengan semakin transparannya informasi yang diperoleh maka perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat sehingga perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang.

Penelitian Hasyim dan Devi dalam Assegaf *et. al* (2012) mengemukakan bahwa proporsi dewan yang memiliki *cross-directorship* berpengaruh signifikan terhadap *earnings quality*. Penelitian di atas menunjukkan bahwa *crossdirectorship* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Repoting* (ISR). Dewan Komisaris yang memiliki kedudukan pada lebih dari satu perusahaan maka akan mudah memperoleh segala informasi dari perusahaan lain yang berguna untuk memberikan nilai tambah perusahaan, dan mengevaluasi manajemen.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis berasumsi dalam penelitian ini variabel *Cross-Direktorship* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

H4 : *Cross-directorship* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

e. Pengaruh Liputan media terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Menurut penelitian Annisa Rostantiningrum (2018) yang berjudul “Pengaruh *size*, *profitabilitas*, *media exposure* dan *leverage* terhadap pengungkapan ISR” menyatakan variable *size* dan *profitabilitas* berpengaruh positif. Sedangkan *media exposure* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Menurut penelitian Aulia dan Agustina (2015) yang berjudul “Pengaruh karakteristik perusahaan, kinerja lingkungan dan liputan media terhadap *Environmental Disclosure*” menyatakan media sangat berpengaruh menjadi alat publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan (*image*) publik tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan perusahaan. Dengan kata lain media merupakan alat yang dapat menggiring opini publik ke arah positif atau negatif tergantung dengan apa yang media sampaikan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Aulia, Febri Zaini, dan Linda Agustina, *Op. Cit*, h. 57.

Liputan media merupakan sarana dimana masyarakat dapat mendapatkan suatu informasi mengenai peristiwa yang terjadi saat ini secara tepat waktu. Masyarakat adalah stakeholder yang memiliki power dalam menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Melalui media, masyarakat dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan apakah perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai kontribusi perusahaan untuk melestarikan lingkungan atau tidak. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan merupakan tujuan perusahaan. Hal ini yang membuat perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tanggung jawabnya serta mengungkapkannya dalam bentuk laporan *Corporate Social Responsibility*, dengan tujuan mendapatkan *image* baik, yang nantinya dapat disampaikan kepada publik oleh media melalui liputan yang mereka lakukan terhadap perusahaan bersangkutan guna mendapat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis berasumsi dalam penelitian ini variable Liputan Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

H5 : Liputan Media berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, et.al. "Bank Syariah di Indonesia: Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (*Islamic Social Responsibility Disclosure*)". *Conference in Business, Accounting and Management*. Vol. 1, No. 1 Desember 2013, pp. 255-267.
- Aulia, Febri Zaini, dan Linda Agustina. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan, Dan Liputan Media Terhadap Environmental Disclosure." *Accounting Analysis Journal*, Vol.4, No.3. 2015.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Carla, Yohana. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fee Audit Dari Segi Client ATTRIBUTE (Studi Pada Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Singapura pada tahun 2011-2012). Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, 2013.
- Chariri, Anis dan Charles Pramudita Ertanto. *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia)*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2012.
- Faisal Nur Fahmi, "Pengaruh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, media exposure dan umur perusahaan pengungkapan corporate social responsibility" Skripsi Program Strata Satu, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho Jayanto. "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*" *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol.5, No.1, Maret 2013, pp.12-20.
- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Indeks*". *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010.
- Forum for Corporate in Indonesia, *Tugas-tugas Utama Dewan Komisaris*, (On-line), tersedia di: ([www.cic-fcgi.org](http://www.cic-fcgi.org))

Ghozali, Imam dan Hengky Latan. “*Partial Least Square* Konsep Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3 Untuk Penelitian Empiris”. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012.

Hadi, Noor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Jono, Munandar, M. et.al, *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, Bogor: IPB Press, 2014.

Junaidi, “*Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Social reporting Index*” dalam Jurnal Akuntansi dan Investasi, STIE Muhammadiyah Palopo Sulawesi Selatan, Vol 16 No. 1 ,Januari 2015.

Khoirudin, Amirul, “Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia”.(Skripsi Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang, 2013.

Kinerja Keuangan : “Pengertian, pengukuran, analisis dan penilaian” (On – line), tersedia di: [Www.Ruangguru.Co.Id](http://Www.Ruangguru.Co.Id)

Lakharis Inuzula, Hasan Basri, Shabari,. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Komisari Dalam Pengungkapan ISR” Dalam Jurnal magister Akuntansi, Vol. 4, No. 4.

Lestari, Puji. 2013. “Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks: Case Of Indonesia”. International Journal of Business and Management Invention. Vol. 2, Oktober 2013, pp. 28-34.

Mansur, S.”Pelaporan CSR Perbankan Syariah Dalam Persepektif Syariah Enterprise Theory” Skripsi, Program Strata Satu Universitas Hasanudin Makasar, 2012.

Mansur, S.”Pelaporan CSR Perbankan Syariah Dalam Persepektif Syariah Enterprise Theory” Skripsi, Program Strata Satu Universitas Hasanudin Makasar, 2012.

Mariska Nanda Savira, “Pengaruh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, *crossdirectorship*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ISR” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015).

Maulida, et.al., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*”. Dalam *Accounting Analysis Journal*. Vol. 9. No. 112, 2014.

Mengutip Khoirudin, Amirul, "Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia". Skripsi Program Strata Satu Universitas Negeri Semarang, 2013.

Meutia, Inten. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010.

Meutia, I, *Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah*, Universitas Brawijaya Malang: 2009.

Mursitama, *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, INDEF, 2011.

Nia Faradilla, "Pengaruh GCG dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*" Skripsi, Akuntansi Syariah, FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

Ningrum, Ratna Aditya, "Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR". Dalam *Accounting Analysis Journal*. 2013.

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, tersedia di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2019.

Peraturan Bank Indonesia, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47.

Poerwanto, *New Business Administratio*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Pratiwi, Kurnia Putri. "Enviromental Incident, Pemberitaan Media Dan Praktik Pengungkapan Lingkungan ( Enviromental Disclosure ) : Studi Pada Sustainability Report Asia Pulp And Paper Co., Ltd." Universitas Diponegoro, 2013.

Raditya, Amalia Nurul., "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES). Skripsi. Universitas Diponogoro, Semarang, 2012.

Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis : pengenalan praktis dan studi kasus*, Jakarta: Kencana, 2006. STIE YKPN.

Sugiono, *Penelitian Administratif*, Bandung: Alfa Beta, 2001.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Taufik, Marlina Widiyanti, Rofiqoh. "Pengaruh IGS, Leverage dan Profitabilitas terhadap ISR", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.13 No.2 Juni 2015.

Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam dunia yang kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Triyuwono, I. Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007.

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah, (On-line), tersedia di <http://badilag.mahkamahagung.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 4 ayat (2 dan 3).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 74.

Utami, Indah Dewi dan Rahmawati. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen*. Vol. 21, No. 3 Desember 2010.

Widiawati, Septi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011". Skripsi. Program Strata Satu Universitas Diponegoro, 2012.

Wulan Suci Maharesti, "Pengaruh Dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas dan lingkungan kerja terhadap pengungkapan isr" Skripsi Program strata satu UIN Yogyakarta, 2018.